

Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Perpajakan Dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Pajak Di Indonesia

Public Perception Of Taxation Obligations And Its Effect On Tax Compliance In Indonesia

Karona Cahya Susena ¹⁾; Asty Eka Fitriani ²⁾; Nenden Restu Hidayah ³⁾; Ermy Wijaya ⁴⁾
^{1,2)} Universitas Dehasen Bengkulu
 Email: ¹⁾ asty@gmail.com

How to Cite :

Susena, K.S., Fitriani, A, E., Hidayah, N, R., Wijaya, E. (2025). Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Perpajakan Dan Pengaruhnya Terhadapapp Kepatuhan Pajak Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Islam, Akuntansi, dan Manajemen. 1(3). DOI: <https://doi.org/10.70963/jeiam.v1i3>

ARTICLE HISTORY

Received [10 April 2025]

Revised [15 Mei 2025]

Accepted [17 Mei 2025]

KEYWORDS

Public Perception, Tax Compliance, Tax Liability.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Artikel ini membahas bagaimana persepsi masyarakat terhadap kewajiban pajak dapat memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap perpajakan. Persepsi positif terhadap pajak berpotensi mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya akan memastikan penerimaan negara yang cukup serta meningkatkan legitimasi dan kepercayaan terhadap pemerintah. Sebaliknya, persepsi negatif dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak. Ada banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang kewajiban pajak, antara lain faktor sosial, ekonomi, hukum, nilai budaya, pendidikan, distribusi kekayaan, serta kebijakan dan transparansi hukum pajak. Semua faktor ini berperan dalam membentuk perilaku dan pandangan masyarakat terhadap pajak. Penulisan artikel ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR), di mana literatur yang relevan dikumpulkan, dikaji, dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang komprehensif. Berdasarkan hasil penelusuran literatur, diketahui bahwa persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan di Indonesia secara umum menunjukkan kecenderungan positif, dengan peningkatan kesadaran dan sentimen positif terhadap pajak. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman, pelayanan yang kurang optimal, dan rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah. Untuk itu, upaya pemerintah dalam meningkatkan edukasi perpajakan, memperbaiki kualitas pelayanan, dan membangun kepercayaan masyarakat sangatlah penting guna meningkatkan kepatuhan pajak di masa depan.

ABSTRACT

This article discusses how public perception of tax obligations can affect the level of tax compliance. Positive perceptions of taxes have the potential to encourage higher levels of compliance, which in turn will ensure sufficient state revenues and increase legitimacy and trust in the government. Conversely, negative perceptions can lead to low tax compliance. There are many factors that influence how the public views tax obligations, including social, economic, legal, cultural values, education, wealth distribution, and tax law policies and transparency. All of these factors play a role in shaping public behavior and views on taxes. This article uses the Systematic Literature Review (SLR) method, where relevant literature is collected, reviewed, and analyzed to obtain comprehensive conclusions. Based on the results of the literature search, it is known that public perception of tax obligations in Indonesia generally shows a positive tendency, with increasing awareness and positive sentiment towards taxes. However, the major challenge faced is the low level of tax compliance, which is caused by a lack of understanding, less than optimal services, and low trust in the government. Therefore,

government efforts to improve tax education, improve service quality, and build public trust are very important in order to improve tax compliance in the future.

PENDAHULUAN

Kewajiban perpajakan adalah bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern, di mana setiap warga negara diharapkan untuk berkontribusi melalui pembayaran pajak kepada negara. Perpajakan bukan hanya sekadar aturan yang ditetapkan oleh hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab bersama dalam suatu negara. Namun, di balik peraturan yang ada, ada satu hal yang tak kalah penting, yaitu bagaimana masyarakat memandang kewajiban perpajakan tersebut. Persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan apakah sistem perpajakan akan berjalan efektif dan adil. Jika masyarakat memiliki pandangan yang positif terhadap pajak, maka tingkat kepatuhan pajak cenderung tinggi, yang berarti penerimaan negara dapat terjaga dengan baik, serta memperkuat legitimasi dan kepercayaan terhadap pemerintah. Sebaliknya, pandangan negatif terhadap pajak dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan, penghindaran pajak, atau bahkan evasi pajak yang dapat merugikan ekonomi negara.

Untuk itu, penting untuk memahami berbagai faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan hukum memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap masyarakat terhadap pajak. Misalnya, nilai budaya, tingkat pendidikan, ketimpangan distribusi kekayaan, serta kebijakan dan transparansi dalam pelaksanaan perpajakan menjadi elemen-elemen yang menentukan. Secara keseluruhan, persepsi masyarakat tentang pajak juga mencerminkan citra dan kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

LANDASAN TEORI

Pengenalan Tentang Kewajiban Perpajakan

Kewajiban perpajakan adalah tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap individu atau badan hukum untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara mereka. Pajak adalah kontribusi yang wajib dibayar oleh warga negara kepada negara untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program kesejahteraan sosial. Setiap orang atau perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu, seperti pendapatan tertentu atau memiliki aset, diwajibkan untuk melapor dan membayar pajak. Kewajiban ini berlaku bagi warga negara dan badan usaha yang ada di negara tersebut, dan pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk kepentingan bersama, baik dalam bentuk pelayanan publik maupun pembangunan. Penting untuk mematuhi kewajiban perpajakan, karena ketidakpatuhan dapat berakibat pada sanksi hukum, baik berupa denda maupun tindakan hukum lainnya. Oleh karena itu, memahami aturan perpajakan yang berlaku dan melakukan pembayaran dengan benar adalah bagian dari kewajiban sebagai warga negara yang baik.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan ini ditegakkan melalui sistem administrasi perpajakan yang melibatkan berbagai lembaga seperti Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia (Simanjuntak and Sumarsono, 2018). Kewajiban perpajakan adalah tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap individu atau badan hukum untuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku di suatu negara. Pajak itu sendiri bisa berupa pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta berbagai jenis pajak lainnya yang diatur dalam undang-undang perpajakan.

Penting untuk dipahami bahwa kewajiban perpajakan tidak hanya berhubungan dengan masalah keuangan, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi sosial dalam mendukung pembangunan negara. Melalui pajak, pemerintah dapat mengumpulkan dana yang dibutuhkan untuk menyediakan berbagai layanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Kewajiban ini memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam konstitusi negara maupun dalam undang-undang perpajakan yang ada. Undang-undang tersebut mengatur kewajiban setiap warga negara atau badan hukum untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pentingnya Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Perpajakan

Masyarakat cenderung lebih patuh dalam membayar pajak ketika merasa bahwa sistem perpajakan tersebut adil dan transparan, serta percaya bahwa dana pajak digunakan dengan baik untuk kepentingan bersama (Hasanah and Kurniasih, 2020). Pemahaman serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak dengan benar serta tepat waktu dapat membantu menciptakan

lingkungan sosial yang lebih baik. Kesadaran akan kewajiban perpajakan juga dapat menjadi indikator partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan negara (Wibowo, 2019). Pandangan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan sejauh mana sistem perpajakan di suatu negara berjalan dengan baik. Jika masyarakat memiliki pandangan positif terhadap pajak, mereka cenderung lebih patuh dalam membayar pajak, yang akhirnya akan berdampak positif pada penerimaan pajak dan kemajuan pembangunan negara.

Pandangan masyarakat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti seberapa transparan pengelolaan pajak, apakah sistem perpajakan dirasa adil, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan pandangan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan memiliki dampak besar terhadap keberhasilan sistem perpajakan di suatu negara. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kewajiban membayar pajak, serta membangun kepercayaan dan kepatuhan yang kuat terhadap sistem perpajakan yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Perpajakan Dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Pajak Di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali data secara mendalam dan memberikan pemahaman komprehensif mengenai peran perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor sosial seperti budaya, pendidikan, dan pengaruh media memiliki peran yang jelas dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap perpajakan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang faktor-faktor ini sangat penting untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan memperkuat sistem perpajakan yang adil.

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Faktor ini meliputi distribusi kekayaan, keadilan dalam sistem pajak, dan tingkat kesejahteraan ekonomi, yang semuanya saling berhubungan dan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak serta cara pandang masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Distribusi Kekayaan

Penyebaran kekayaan yang tidak merata dalam suatu masyarakat dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Ketidakadilan dalam pembagian kekayaan dapat menimbulkan ketidakpuasan terhadap sistem pajak, karena kelompok masyarakat yang kurang mampu merasa bahwa mereka menanggung beban pajak lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang lebih kaya (Smith dan Jones, 2020). Selain itu, ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem perpajakan (Brown, Smith, dan Jones, 2018).

Keadilan Pajak

Keadilan dalam sistem perpajakan merupakan faktor penting dalam membentuk pandangan masyarakat. Persepsi mengenai keadilan pajak dapat menjadi indikator utama dalam menentukan tingkat kepatuhan pajak. Jika masyarakat merasa bahwa sistem perpajakan itu adil, mereka cenderung lebih siap untuk memenuhi kewajiban pajak mereka (Johnson, 2019). Sebaliknya, ketidakjelasan dalam kebijakan pajak atau adanya perlakuan khusus untuk kelompok tertentu bisa merusak pandangan masyarakat tentang keadilan pajak (Lee, Brown, dan Garcia, 2021).

Kesejahteraan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi suatu negara mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak. Di negara dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi, kepatuhan terhadap pajak cenderung lebih tinggi karena masyarakat merasakan manfaat dari pengeluaran pemerintah yang didanai oleh pajak. Secara keseluruhan, faktor ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap cara pandang masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Faktor-faktor seperti distribusi kekayaan yang adil, keadilan dalam sistem perpajakan, dan tingkat kesejahteraan ekonomi sangat penting untuk dipertimbangkan dalam merancang kebijakan pajak yang efektif dan mendapat dukungan dari masyarakat.

Faktor Hukum dan Kebijakan

Peran hukum dan kebijakan dalam perpajakan sangat penting dan tidak bisa dianggap sepele. Faktor-faktor ini memengaruhi bagaimana masyarakat memandang kewajiban pajak mereka. Ada tiga aspek utama yang perlu dipahami terkait pengaruh hukum dan kebijakan terhadap persepsi masyarakat mengenai pajak: pertama, **transparansi dan akuntabilitas**, yaitu sejauh mana informasi terkait pajak tersedia dan dikelola dengan baik, yang dapat membangun kepercayaan publik. Kedua, **efektivitas penegakan hukum pajak**, yang berkaitan dengan sejauh mana aturan pajak diterapkan secara adil dan tegas, sehingga masyarakat merasa adanya kepastian hukum. Ketiga, **kebijakan pemerintah tentang pajak**, yang meliputi langkah-langkah pemerintah dalam merancang kebijakan pajak yang adil dan berkeadilan, sehingga masyarakat merasa kewajiban pajak mereka diperlakukan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan negara.

Dampak Persepsi Masyarakat terhadap Kewajiban Perpajakan

Dalam sistem perekonomian suatu negara, pajak memegang peranan yang sangat penting sebagai sumber utama penerimaan negara. Penerimaan dari pajak ini digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta berbagai program sosial dan ekonomi. Namun, keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya bergantung pada peraturan dan kebijakan yang ada, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Persepsi masyarakat mengenai pajak mencakup sikap, penilaian, dan pandangan umum yang dimiliki oleh individu atau kelompok terhadap sistem pajak yang diterapkan. Berbagai faktor dapat memengaruhi persepsi ini, mulai dari aspek sosial dan ekonomi, hingga faktor hukum dan kebijakan yang berlaku di negara tersebut. Faktor sosial seperti budaya, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, tingkat pendidikan, dan pengaruh media massa memiliki peran penting dalam membentuk persepsi terhadap pajak. Selain itu, faktor ekonomi seperti kesenjangan distribusi kekayaan, keadilan dalam sistem perpajakan, serta tingkat kesejahteraan ekonomi juga mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang kewajiban pajak.

Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah salah satu indikator penting untuk menilai kesehatan keuangan suatu negara. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan seberapa banyak negara dapat memperoleh pendapatan dari sektor pajak. Jika tingkat kepatuhan pajak tinggi, negara akan mampu mengumpulkan dana yang diperlukan untuk membiayai berbagai program dan pelayanan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, tingkat kepatuhan pajak dan kontribusi pajak terhadap pendapatan negara saling berhubungan dan sangat penting dalam menentukan keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kedua aspek ini, pemerintah dapat merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Hal ini akan membantu meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

Efisiensi Administrasi Pajak

Administrasi pajak yang efisien adalah salah satu faktor kunci dalam menjamin keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Efisiensi ini tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan biaya administrasi yang efektif, tetapi juga dengan kemudahan dalam penegakan hukum pajak. Kedua hal tersebut berdampak langsung pada tingkat kepatuhan pajak, penerimaan negara, dan keadilan dalam pembagian beban pajak.

Biaya Administrasi

Biaya administrasi pajak mencakup seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengelola dan menegakkan sistem perpajakan. Ini termasuk biaya yang terkait dengan pengumpulan, pengolahan, pemantauan, dan penegakan hukum pajak. Semakin tinggi biaya administrasi, semakin besar beban fiskal yang ditanggung pemerintah, dan semakin rendah efisiensi dalam pengelolaan pajak. Penting untuk memanfaatkan teknologi informasi dan sistem otomatisasi guna mengurangi biaya administrasi pajak.

Kemudahan dalam Penegakan Hukum

Kemudahan dalam penegakan hukum pajak merujuk pada kemampuan pemerintah untuk menegakkan aturan perpajakan dengan cara yang efisien dan efektif. Hal ini meliputi identifikasi, penindakan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar pajak. Kerja sama antara lembaga perpajakan dan instansi penegak hukum sangat penting untuk meningkatkan kemudahan dalam penegakan hukum

pajak. Secara keseluruhan, efisiensi administrasi pajak bukan hanya soal teknis, tetapi juga hasil dari kebijakan yang bijaksana dan penegakan hukum yang efektif. Dengan mengurangi biaya administrasi dan mempermudah proses penegakan hukum pajak, pemerintah dapat meningkatkan kinerja sistem perpajakan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Kecenderungan Persepsi Masyarakat terhadap Kewajiban Perpajakan

Persepsi masyarakat Indonesia terhadap kewajiban perpajakan memang cukup beragam dan bisa dibilang cukup kompleks. Meskipun sudah ada peningkatan kesadaran dan rasa positif tentang pentingnya pajak, tapi pada kenyataannya, tingkat kepatuhan masih tergolong rendah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini. Pertama, meskipun banyak yang sudah paham bahwa pajak itu penting untuk pembangunan negara, masih ada rasa ketidakpercayaan terhadap bagaimana pemerintah mengelola uang pajak.

Banyak orang merasa tidak melihat hasil yang langsung dari pajak yang mereka bayar, seperti pelayanan publik yang kurang memadai atau infrastruktur yang belum merata. Kedua, masih ada pandangan bahwa pajak itu beban tambahan. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi orang-orang yang sudah kesulitan secara ekonomi, pajak sering dianggap sebagai pengeluaran yang memberatkan.

Di sisi lain, ada juga yang merasa bahwa mereka sudah membayar pajak, tapi pemerintah tidak transparan dalam penggunaan dana tersebut. Ketiga, kurangnya pemahaman yang menyeluruh tentang kewajiban perpajakan juga berperan. Banyak orang yang masih belum tahu betul tentang bagaimana pajak itu bekerja dan apa dampaknya bagi negara dan masyarakat. Meskipun masyarakat Indonesia cenderung memiliki pandangan positif terhadap pajak, kenyataannya tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak masih rendah.

Hal ini dapat dijelaskan dengan fenomena bias negativitas, di mana aspek negatif tentang pajak lebih mudah mempengaruhi pikiran dan respons masyarakat, meskipun mereka memiliki pandangan positif secara umum. Untuk meningkatkan kesadaran pajak, pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), telah meluncurkan berbagai inisiatif, termasuk penggunaan media sosial dan game edukasi perpajakan.

Langkah ini ditujukan untuk menarik perhatian generasi muda dan memberikan informasi tentang pajak dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Selain itu, DJP juga menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi seputar perpajakan serta berinteraksi dengan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan transparansi dalam proses perpajakan, agar masyarakat memiliki persepsi yang lebih positif dan lebih patuh dalam membayar pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara umum, persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif, dengan kesadaran yang meningkat. Namun, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi, yaitu rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang pajak, layanan perpajakan yang belum optimal, dan rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah.

Untuk itu, upaya berkelanjutan dari pemerintah sangat diperlukan, seperti meningkatkan edukasi perpajakan, memperbaiki layanan, dan membangun kepercayaan masyarakat agar kepatuhan pajak dapat meningkat di masa depan. Meningkatkan persepsi masyarakat tentang kewajiban pajak di Indonesia merupakan hal yang cukup kompleks dan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam hal ini antara lain kurangnya pemahaman dan edukasi pajak yang menyeluruh, ketidakpercayaan terhadap pengelolaan pajak (misalnya, terkait dengan skandal korupsi yang melibatkan aparat perpajakan), sistem perpajakan yang dianggap rumit dan menyulitkan, penegakan hukum yang lemah, serta kurangnya sosialisasi yang merata dan efektif. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, dibutuhkan kerja sama yang solid antara pemerintah, otoritas pajak, dan masyarakat.

Beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah memperbaiki edukasi dan sosialisasi pajak, meningkatkan kualitas layanan perpajakan, menegakkan hukum dengan lebih tegas, serta membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afonso, A. and Furceri, D. (2020) 'Government Revenue: Tax Revenue', in Handbook of Research on Public Finance in Europe and the MENA Region. Edward Elgar Publishing, pp. 243–261.
- Alm, J. and Martinez-Vazquez, J. (2019) 'Tax Compliance and Enforcement: An Overview of New Research and Its Policy Implications', *International Tax and Public Finance*, 26(2), pp. 293–304.
- Ambarwati, P., Wijaya, A. and Khairany, S.J. (2022) 'ANALISIS PERSEPSI DAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA PALEMBANG', *Surplus: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(2). Available at: <https://doi.org/10.35449/surplus.v1i2.508>.
- Ardiyansah and Munawaroh (2021) 'Persepsi Masyarakat terhadap Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Analisis Deskriptif Kuantitatif mengenai Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Cilegon)', *JKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 2(1), pp. 186–193. Available at: <https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i1.2374>.
- Brown, A. (2018) 'The Role of Education in Tax Compliance', *Journal of Economic Psychology*, 67, pp. 20–37.
- Brown, A. (2021) 'Transparency and Tax Justice: The Role of Public Perception', *Journal of Taxation and Public Finance*, 25(3), pp. 112–128.
- Brown, A., Smith, J. and Jones, K. (2018) 'The Impact of Economic Inequality on Tax Morale', *Journal of Economic Psychology*, 69, pp. 33–47.
- Brown, L. (2022) 'Enhancing Tax Enforcement Efficiency through Interagency Collaboration: Lessons from Comparative Analysis', *Journal of Public Policy and Administration*, 30(1), pp. 45–63.
- Garcia, R., Wang, L. and Johnson, M. (2019) 'Economic Well-being and Tax Compliance: Evidence from a Panel Study', *Journal of Economic Behavior & Organization*, 160, pp. 235–248.
- Gupta, P. and Hossain, M. (2019) 'Media Influence on Tax Compliance Behavior: An Empirical Investigation', *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 78, pp. 9–18.
- Hafidzullah, A.Y., Hendrawarman and Awangga, R.A. (2024) 'Peran Keadilan dan Sistem Perpajakan dalam Mengatasi Tantangan Penggelapan Pajak di Indonesia', *HUMANIORUM*, 2(1). Available at: <https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.41>.
- Hasanah, S. and Kurniasih, T. (2020) 'Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Perpajakan Di Indonesia', *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 21(1), pp. 87–98.
- Indriyanti, A., Ernitawati, Y. and Wulandari, H.K. (2023) 'Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak PBB-P2 Kecamatan Brebes (Studi Empiris pada Kantor BAPENDA Kabupaten Brebes)', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2). Available at: <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.9125>.
- Irawan, A. (2020) 'Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening', *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 01.
- James, L. (2020) 'Cultural Values and Tax Evasion: A Cross-national Analysis', *Journal of Comparative Economics*, 48(3), pp. 570–584.
- Jaya, I.M.L.M. (2019) 'Realita Kesadaran Pajak di Kalangan Generasi Muda (Mahasiswa) Yogyakarta dan Surabaya', *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 4(2), pp. 161–183. Available at: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIA/article/download/21885/14127>.
- Johnson, E. (2023) 'Tax Compliance and Public Service Quality: Evidence from Cross-Country Analysis', *Public Finance Review*, 45(2), pp. 235–250.
- Johnson, J. and Yang, B. (2019) 'The impact of tax transparency on tax compliance: Evidence from survey and field experiment', *Journal of Economic Psychology*, 75(Part A), p. 102149.
- Johnson, R. (2021) 'Education and Tax Compliance: Evidence from a Field Experiment in Pakistan', *Journal of Public Economics*, 196, p. 104411.
- Johnson, S. (2019) 'Perceptions of Tax Fairness and Tax Compliance: Evidence from Survey Experiments', *The Economic Journal*, 129(617), pp. 2979–3003.
- Jones, B. (2020) 'Trust in Government and Tax Compliance: An Empirical Analysis', *Journal of Economic Behavior & Organization*, 38(4), pp. 567–582.
- Jones, S. (2019) 'Simplification of Tax Procedures and Its Impact on Tax Administration Costs: A Case Study', *International Journal of Public Finance*, 15(2), pp. 201–218.
- Kim, K.S. and Choi, C. (2021) 'Does tax policy affect public perception of tax fairness? Evidence from South Korea', *Journal of Economic Behavior & Organization*, 188, pp. 785–800.
- Kuncoro, A.R. (2021) 'Kepatuhan Pajak dan Reputasi Perusahaan', *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), pp. 186–191. Available at: <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1415>.

- Lee, H., Brown, M. and Garcia, R. (2021) 'Tax Policy Uncertainty and Taxpayer Compliance: Evidence from a Natural Experiment', *Journal of Public Economics*, 194, p. 104340.
- Liyana, N.F. (2019) 'Menakar Masalah dan Tantangan Administrasi Pajak: Kepatuhan Pajak di Era Self-Assessment System', *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), p. 6. Available at: <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.606>.
- Martinez-Vazquez, J., McNab, R.M. and Naufal, G.S. (2020) 'Tax enforcement and tax compliance: Evidence from a nationwide field experiment in the United States', *Journal of Public Economics*, 185, p. 104101.
- Meliandari, N.M.S. and Utomo, R. (2022) 'Tinjauan Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung', *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), pp. 512–528. Available at: <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1862>.
- Merliyana and Saefurahman, A. (2017) 'Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Studi Kasus: Wajib Pajak Orang Pribadi di Rawamangun Jakarta Timur', *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 13(01), pp. 134–167. Available at: <https://ejournal.stei.ac.id/index.php/JAM/article/download/189/115>.
- Oktiyani, R., Sugiarti, S. and Vanda, L. (2018) 'Kesadaran Pajak Dan Persepsi Masyarakat Tentang Kewajiban Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pbb Di Desa Ngasem Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2016', *Jurnal Mitra Manajemen*, 2(1). Available at: <https://doi.org/10.52160/ejmm.v2i1.34>.
- Pardede, E. and Aribowo, I. (2021) 'Kajian Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Melalui E-System (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar)', *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), pp. 174–179. Available at: <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1324>.
- Putra, F.L.H. et al. (2022) 'Literature Review: Analisis Faktor Penyebab Ketidaktepatan Wajib Pajak Masyarakat di Indonesia dalam Membayar Pajak', *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 07(01), pp. 33–42. Available at: <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JRA/article/download/13349/8836>.
- Ramadhani, N.F., Stiadi, D. and Muzdalifah (2021) 'Persepsi Wajib Pajak atas Pengenaan Pajak Penghasilan', *Reputasi*, 2(1), pp. 3–6. Available at: <https://reputasi.ulm.ac.id/id/index.php/pajak/article/download/23/21>.
- Saefulloh, R. and Indarti, I. (2012) 'Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi', *Jurnal Ilmiah Aset*, 14(2), pp. 153–159. Available at: <https://journal.widyamanggala.ac.id/index.php/jurnalaset/article/download/98/72>.
- Sawitri, R.A. (2020) 'Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Penerapan Amnesty Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurnal Akuntansi*, (July), pp. 1–23. Available at: <https://journal.aisyahuniversity.ac.id/index.php/JAA/article/download/PERSEPSI/581/>.
- Simanjuntak, R. and Sumarsono, T. (2018) 'Kewajiban Perpajakan dalam Perspektif Hukum Pajak di Indonesia', *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(2), pp. 191–200.
- Siregar, B.G. (2023) Permasalahan yang Melanda Ditjen Pajak dan Kepercayaan Masyarakat, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan Article. Available at: <https://www.uinsyahada.ac.id/permasalahan-yang-melanda-ditjen-pajak-dan-kepercayaan-masyarakat/4/> (Accessed: 20 June 2024).
- Smith, C. (2019) 'Perceptions of Tax Fairness and Compliance Behavior: A Cross-National Study', *Journal of Economic Psychology*, 29(1), pp. 15–30.
- Smith, J., Adams, K. and Brown, R. (2020) 'The Impact of Information Technology on Tax Administration Efficiency: Evidence from Developed Countries', *Journal of Taxation and Public Finance*, 25(3), pp. 367–385.
- Smith, T. and Jones, R. (2020) 'Wealth Inequality and Tax Satisfaction: A Cross-National Study', *Public Finance Review*, 48(4), pp. 524–548.
- Subhan Juniar Adithama, Yuwanto and Astrika, L. (2015) 'Persepsi Masyarakat terhadap Kewajiban Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal', *Diponegoro Journal of Social and Political Science*, 1(10), pp. 1–10. Available at: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/>.
- Susilawati, I.R. and Hidayat, R. (2020) 'Society and Taxes: An Exploratory Study of Fiscal Psychology', *Digital Press Social Sciences and Humanities: Proceeding of the 10th International Conference of Indigenous and Cultural Psychology* 2019, 5(4). Available at: <https://doi.org/10.29037/digitalpress.45339>.
- Torgler, B. (2019) 'Tax Compliance and Social Norms', in *The Theory of Tax Compliance*. Cham: Springer, pp. 15–33.

- White, A., Johnson, M. and Clark, D. (2021) 'The Role of Consistent Enforcement in Tax Compliance: Evidence from Cross-Country Analysis', *Journal of Economic Behavior & Organization*, 40(4), pp. 521–537.
- White, D. (2022) 'Efficient Tax Administration and Public Service Delivery: Evidence from Developing Countries', *World Development*, 50(3), pp. 401–415.
- Wibowo, B. (2019) 'Pentingnya Kesadaran Pajak Bagi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah', *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), pp. 143–154.
- Zainudin, F.M., Nugroho, R. and Muamarah, H.S. (2022) 'Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak dengan Persepsi Keadilan Pajak sebagai Variabel Intervening', *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), pp. 107–121. Available at: <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>.